



# **RENJA** (Rencana Kerja) **TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
KECAMATAN TEBING**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan "Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tebing Tahun 2023" dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan wujud penjabaran dari Renstra Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun 2021 - 2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Karimun serta Target dan Sasaran Pembangunan Nasional yang dilaksanakan melalui OPD Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, serta sebagai pedoman OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya *good governance*.

Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara dan pemerintahan, termasuk Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tebing Tahun 2023, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan petunjuk pelaksanaan kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tebing Tahun 2023 ini dapat disusun dan diterbitkan.

Tebing , 2022

CAMAT TEBING

**MARKUS TERKELIN TARIGAN, S.Sos**

NIP.19750321 200312 1 009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	6
2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	7
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	7
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	7
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	7
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....	8
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	8
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	8
BAB V. PENUTUP .....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA.....	9
2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan.....	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan .....	25
2.3.1 Reformasi Birokrasi atau Penataan Sumber Daya Manusia .....	25
2.3.2 Peningkatan sarana dan prasarana .....	26
2.3.3 Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan .....	26

2.4	Review Terhadap Rancangan Awal .....	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....		32
3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	33
3.3	Program dan Kegiatan .....	33
3.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA .....	33
3.3.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK .....	35
3.3.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.....	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....		36
BAB V PENUTUP .....		46

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 .....	10
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2022 .....	22
Tabel 2.3 Analisa Pencapaian Kinerja Kecamatan Tebing .....	24
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Kecamatan Tebing .....	25
Tabel 2.5 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kecamatan Tebing .....	28
Tabel 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TEBING TAHUN ANGGARAN 2023 .....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja, dalam hal ini Renja Kecamatan Tebing, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Tebing merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Tebing, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini,

evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan harus mencakup 5 pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, di mana dengan adanya pemilihan kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat kepala daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan;
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah;
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan Pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan;
4. Pendekatan Top-Down (atas-bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintahan di atasnya;
5. Pendekatan Bottom-Up (bawah-atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintahan dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Bottom Up diseleraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renja Kecamatan Tebing tahun 2022 didasarkan pada ketentuan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Natuna, Kabupaten Kuantan singingi dan Kota Batam ( Lembar Negara tahun 1999,Nomor 181,tambahan lembaran Negara nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Udnang-Undang 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan,Kabupaten rokan hulu,Kabupaten natuna,Kabupaten Kuantan singingi dan kota Batam

- (Lembaran Negara tahun 2008, nomor 107, Tambahan lembaran Negara nomor 4880);
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
  4. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sisitem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104,tambahan lembaran Negara republikj Indonesia nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan;
  7. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang system Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indoensia tahun 2006 nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  11. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tagun 2006 Nomor 97,Tambahan lembaran Negara Republik Indoensia nomor 4664);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, Kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 19 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 nomor 19);
16. Peraturan daerah Kabupaten Karimun nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tahun 7 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) kabupaten karimun tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah kebuapten Karimun tahun 207 nomor & , tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten karimun Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 9 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun Anggaran 2018
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 70)
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69.A Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 74)

23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Penetapan Revisi Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor 71.
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **➤ Maksud**

Adapun maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tebing adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Tebing untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **➤ Tujuan**

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tebing Tahun 2022 adalah guna merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan serta tugas dan fungsinya.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan

garis besar isi.

## **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Pada Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja perangkat daerah sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah Tahun lalu dan realisasi renstra perangkat daerah, Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan / realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
2. Realisasi program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
3. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau tidak terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah tabel realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan disesuaikan dengan format halaman terlampir.

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nopmor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja. Jika perangkat daerah bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan.

### **2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Bagian ini berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan ;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional/Internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan perangkat daerah ;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda

## **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Deskripsi untuk mengisi sub-sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaah terhadap kebijakan nasional.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya;
4. Tabel rencana program dan kegiatan.

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan atau catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya dari seluruh bab yang dimuat dalam Renja Kecamatan besisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

#### 2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah

Tahun 2021 merupakan pelaksanaan Renstra Kecamatan Tebing (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2021 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Tebing sebesar **Rp. 7.518.551.894,00** (*Tujuh milliard lima ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratussembilan puluh empat rupiah*) yang terdiri atas belanja langsung sebesar **Rp. 3.223.010.451,00** (*Tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta sepuluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah*) dan belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.295.541.443,00** (*Empat milyar duat ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah*).

Dari plafon anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. **7.251.819.847,00** (*Tujuh milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah*) atau mencapai **96,45%** dengan rincian realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. **4.088.935.627,00** (*Empat miliyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*) dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. **3.162.884.220,00** (*Tiga milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua puluh dua rupiah*) yang terdiri dari 2 program dengan 8 kegiatan yang terbagi menjadi 19 sub kegiatan. Tidak terserapnya anggaran keseluruhan antara lain adanya selisih pembayaran gaji dan tunjangan ASN, belanja jasa tenaga administrasi, dan pelaksanaan adminisrasi umum perangkat daerah dengan pagu anggaran; pada jabatan eselon IV yang kosong, serta yang purna tugas.

Berikut akan disajikan tabel berkaitan dengan capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2021**

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA					KINERJA KEUANGAN				REALISASI FISIK (%)
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%	
<b>URUSAN KECAMATAN</b>												
A	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Lebih Baik (PERMENDAGRI NO 5 TAHUN 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyeleng	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	80			Rp 6,464,836,734	Rp 6,208,214,247	Rp 237,582,187	96.03	100

	uraian Urusan Pemerintah an)											
1		Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Pelaporan penganggara n terealisasi tepat waktu namun pelaksanaan penyusunan dokumen tanpa rentang waktu	Dibutuhk an anggaran untuk keahlian khusus bidang IT Dalam penyusu nan dokumen agar tercapain ya sasaran kinerja opd	Rp 57,405,500	Rp 52,047,300	Rp 5,358,200	90.67	100
1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			Rp 17,924,000	Rp 17,833,300	Rp 90,700	99.49	100
1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen			Rp 39,481,500	Rp 34,214,000	Rp 5,267,500	86.66	100



		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah pegawai dan honor sudah sesuai dan terisi sesuai kebutuhan	1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan sesuai dengan Kebutuhan	Rp 4,352,485,443	Rp 4,145,879,627	Rp 206,605,816	95.25	100
2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai (Jlh. Pegawai x 14 Bln)	560 Orang Bln 40 Org x 14 Bln	560 Orang Bln 40 Org x 14 Bln		2. Pembayaran Honorarium sesuai dengan SK Bupati dan SK Camat	Rp 4,162,101,443	Rp 3,955,495,627	Rp 206,605,816	95.04	100
2.2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai (Jlh. Pegawai x 12 Bln)	312 Org Bln 26 Org x 12 Bln	312 Org Bln 26 Org x 12 Bln	Kurangnya minat ASN Pada tugas pengelolaan keuangan	Karena Minimnya Anggaran Beban Kerja pengelola keuangan	Rp 190,384,000	Rp 190,384,000	Rp -	100.00	100

3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Fisik Pengadaan Seragam Pakaian Dinas sudah terealisasi lengkap di Tw 1 namun masih terdapat tunggakan pembayaran ke pihak ketiga terkait efisiensi waktu pencairan yang terbatas	Diharapkan kegiatan selesai proses pembayaran selesai agar tidak terjadi tunggakan ke pihak ketiga	Rp 215,528,280	Rp 197,290,500	Rp 18,237,780	91.54	100
3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	106 Stel	106 Stel			Rp 215,528,280	Rp 197,290,500	Rp 18,237,780	91.54	100

4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	Minim nya Anggaran dan Belum Terealisasi dengan sempurna pada Penyediaan adum sehingga pelaksanaan operasional perkantoran kurang maksimal	Dibutuh an anggaran sesuai budget kecamatan demi Kelancar an Pelaksanaan Operasio nal Perkanto ran dalam melayani masyarakat baik di kecamatan dan keluraha n	Rp 310,224,040	Rp 291,823,450	Rp 1,440,290	94.07	100
4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor dalam satu tahun	10 Jenis	10 Jenis			Rp 2,358,800	Rp 1,350,000	Rp 1,008,800	57.23	100

4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Jenis	20 Jenis			Rp 140,256,940	Rp 139,825,450	Rp 431,490	99.69	100
4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	6 Jenis			Rp 4,200,000	Rp 4,200,000	Rp -	100.00	100
4.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Jenis	8 Jenis			Rp 21,548,300	Rp 16,025,000	Rp 5,523,300	74.37	100
4.5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	15000 Lembar	15000 Lembar			Rp 3,720,000	Rp 3,720,000	Rp -	100.00	100
4.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/ Peraturan Perundang-undangan	10 Eksemplar	10 Eksemplar			Rp 800,000	Rp 800,000	Rp -	100.00	100
4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Jumlah SPPD	70 x rapat 50 SPPD	70 x rapat 50 SPPD			Rp 137,340,000	Rp 125,903,000	Rp 11,437,000	91.67	100

		SKPD										
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang	1 Laporan	1 Laporan	Masih kurangnya anggaran dalam pengelolaan arsip	Tersedia nya tempat khusus pengarsipan	Rp 199,548,910	Rp 199,273,000	Rp 275,910	99.86	100
5.1		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Unit Mebel	5 Unit	5 Unit			Rp 199,548,910	Rp 199,273,000	Rp 275,910	99.86	100
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan jasa	3 Laporan	3 Laporan	Kurangnya anggaran yang tersedia sehingga mengakibatkan pelayanan kurang maksimal	Perlu ditelaah lebih detail dalam penyusunan anggaran di tahun berikutnya	Rp 1,289,801,461	Rp 1,283,416,828	Rp 4,304,633	99.50	100
6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	3000 Lembar	3000 Lembar			Rp 1,350,000	Rp 750,000	Rp 600,000	55.56	100
6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Bukti Pembayaran 3 Tagihan x 12 Bln	36 Bukti Pembayaran 3 Tagihan x 12 Bln			Rp 85,451,461	Rp 81,746,828	Rp 3,704,633	95.66	100
6.3		Penyediaan Jasa	Jumlah Non ASN	858 Org Bln	858 Org Bln			Rp 1,203,000,000	Rp 1,200,920,000	Rp 2,080,000	99.83	100

		Pelayanan Umum Kantor	yang dibayarkan gaji (Jlh. Pegawai x 13 Bln)	66 Org x 13 Bln	66 Org x 13 Bln							
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	2 Laporan	2 Laporan	Tidak Terpeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 yang dalam kondisi Rusak Berat, karena minimnya Anggaran	Diharapkan Terealisasi Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan di Tahun berikutnya	Rp 39,843,100	Rp 38,483,542	Rp 1,359,558	96.59	100
7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan	12 Unit	12 Unit			Rp 38,297,000	Rp 37,033,542	Rp 1,263,458	96.70	100
7.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Unit Kendaraan	7 Unit	7 Unit			Rp 1,546,100	Rp 1,450,000	Rp 96,100	93.78	100

		Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
B	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Lebih Baik (Peraturan Pemerintah RI No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	2,90	3,3			Rp 1,053,715,160	Rp 1,043,605,600	Rp 10,109,560	99.04	100

1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Fisik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksana dengan Baik, walaupun belum tersedianya anggaran sehingga kegiatan harus dijalankan dan dilaksanakan tepat waktu sesuai agenda yang ditetapkan hal ini mengakibatkan kegiatan kurang maksimal karena efisiensi waktu pembayaran dan	Untuk ditelaah bersama dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya mohon diperhatikan kecamatan yang merupakan opd terkecil dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung IKU bupati dalam pembangunan agar diprioritaskan dalam penyerapan	Rp 1,053,715,160	Rp 1,043,605,600	Rp 10,109,560	<b>99.04</b>	100
---	--	---	----------------	-----------	-----------	--	--	---------------------	---------------------	------------------	--------------	-----



						pencairan yang sangat terbatas	anggaran karena kegiatan ini melibatkan langsung pada masyarakat banyak					
1.1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Di limpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 Jenis Urusan	8 Jenis Urusan			Rp 1,053,715,160	Rp 1,043,605,600	Rp 10,109,560	99.04	100
<b>TOTAL</b>								<b>Rp 7,518,551,894.00</b>	<b>Rp 7,251,819,847.00</b>	<b>Rp 247,691,747.00</b>	<b>96.45</b>	<b>100</b>

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tebing tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Tebing, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Tebing tahun berjalan (tahun 2022).

Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tebing sampai dengan tahun 2021 dan perkiraan capaian renja tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2022**

No.	Program/Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun	Rencana Aksi	KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022		
					TAREGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TAREGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	75	Membuat Koesioner terhadap pelayanan masyarakat						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	2 Dokumen	Dokumen renja dan dokumen RB	100.00%	90.67%	90.67%	100.00%	0.00%	0.00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	2 Laporan	Pembayaran gaji ASN dan lainnya	100.00%	95.25%	95.25%	100.00%	0.00%	0.00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan	2 Laporan	Pembayaran gaji ASN dan lainnya	100.00%	91.54%	91.54%	100.00%	0.00%	0.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	5 Laporan	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	100.00%	94.07%	94.07%	100.00%	0.00%	0.00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit mebel	5 Unit	Pengadaan Mebeleur	100.00%	99.86%	99.86%	100.00%	0.00%	0.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan	2 Laporan	Pengadaan kebutuhan kantor dan gaji honorer	100.00%	99.50%	99.50%	100.00%	0.00%	0.00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang dipelihara	2 Laporan	Penyediaan akomodasi kendaraan dinas	100.00%	96.59%	96.59%	100.00%	0.00%	0.00%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	2.90	6					0.00%	0.00%
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan	1 Laporan	Melaksanakan kegiatan urusan daerah bawahan seperti mtq, musrenbang dll	100.00%	99.04%	99.04%	100.00%	0.00%	0.00%

**1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.**

Kecamatan Tebing tidak ada Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2021.

**2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.**

Pada Tahun 2021 Kecamatan Tebing dapat merealisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

**3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.**

Kecamatan Tebing tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2022.

**4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan**

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja, penetapan anggaran kas sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan.

**5. Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra Kecamatan Tebing**

Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai.

**6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, penganggaran baik itu Kasubbag PRK dan staf yang menangani perencanaan dan penganggaran serta para pejabat eselon III, sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Pemerintah Kecamatan Tebing merupakan pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman ketertiban, pelayanan umum dan pemberi pelayanan administrasi ditingkat Kecamatan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Tebing menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat diperlukan beberapa upaya serta tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dapat di lihat dari tabel analisis pencapaian kinerja Kecamatan Tebing antara lain sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Analisa Pencapaian Kinerja Kecamatan Tebing**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode							Kondisi kinerja pada Akhir periode
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	70	75	78	78,5	79	79,5	80	80
AKIP Kecamatan Tebing	Nilai	53,45	54	60	61	62	63	64	64
Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,75	2,90	3,01	3,50	3,51	3,55	4,00	4,00
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Persen	50	56	59	59	59	59	59	59

Dapat di lihat dari tabel dibawah ini berkaitan dengan capaian kinerja Kecamatan Tebing antara lain sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Capaian Kinerja Kecamatan Tebing**

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	AKIP Kecamatan Tebing	NA	37.50	52,59
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	70	75

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Presentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tebing, 75 dan realisasi sebesar 75 (B). Kategori Pelayanan **BAIK**, maka memerlukan peningkatan baik kuantitas dan kualitas SDM maupun sarana dan prasarana penunjang (peralatankantor maupun kebijakan internal).

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tebing melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

#### **2.3.1 Reformasi Birokrasi atau Penataan Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka pelayanan yang prima langkah strategis yang ditetapkan SKPD Kecamatan Tebing adalah :

- a. Menyiapkan petugas pelayanan yang terampil
- b. Memberikan kesempatan petugas pelayanan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

- c. Mendorong untuk bekerja yang professional dengan memberikan penghargaan bagi petugas yang disiplin dan berprestasi serta memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan;
- d. Memberikan insentif bagi petugas pelayanan.

### **2.3.2 Peningkatan sarana dan prasarana**

Untuk menunjang pelayanan yang baik diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Menyediakan tempat pelayanan yang mudah didapat oleh pelanggan;
- b. Menyediakan papan informasi mengenai mekanisme atau tata cara dan prosedur pelayanan;
- c. Melengkapi perangkat dan peralatan yang canggih untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan;
- d. Menyediakan pengaduan masyarakat melalui media elektronik (email, telepone, faximile)

### **2.3.3 Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan**

Langkah dan upaya sangat diperlukan demi kemajuan suatu organisasi. Berikut ini upaya yang harus dilakukan di Kecamatan Tebing antara lain sebagai berikut :

- a. Sosialisasi dan memberi informasi kepada masyarakat setiap ada kegiatan dan pertemuan warga mengenai sistem pelayanan di Kecamatan Tebing;
- b. Memberikan informasi dan penekanan kepada kepala desa/kelurahan melalui komperensi untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pelayanan di tingkat Desa/Kelurahan;
- c. Menyederhanakan prosedur pelayanan dengan tetap mengedepankan aturan yang telah ditetapkan;
- d. Menanggapi setiap ada pengaduan masyarakat 1 kali 24 jam untuk segera diselesaikan.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal**

Rancangan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2021 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja Tahun 2021.

Rencana Kerja Kecamatan Tebing Tahun 2021 yang memuat usulan program dan kegiatan Tahun 2021 yang terdiri dari 2 program dengan 8 kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Tebing Tahun 2021. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut :



Tabel 2.5

## Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kecamatan Tebing

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>											
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kec. Tebing	Terselenggaranya pelayanan dan operasional Kecamatan	100%	1,593,544,760	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Kec. Tebing	Terselenggaranya pelayanan dan operasional Kecamatan	95.95%	1,529,032,028	
<b>B Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>											
1	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Kec. Tebing	Jumlah Pengadaan Pakaian	100%	79,999,600	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Kec. Tebing	Jumlah Pengadaan Pakaian	98.21%	78,574,300	
<b>C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>											
1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) OPD	Kec. Tebing	Jumlah buku/dokumen yang dicetak	100%	20,000,000	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) OPD	Kec. Tebing	Jumlah buku/dokumen yang dicetak	97.50%	19,511,000	

<b>D Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>											
1	Pemeliharaan Bahu Jalan	Kec. Tebing	Panjang jalan yang dipelihara	100%	499,299,940	Pemeliharaan Bahu Jalan	Kec. Tebing	Panjang jalan yang dipelihara	99.81 %	498,916,500	
<b>E Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>											
1	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kec. Tebing	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	100%	29,999,800	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kec. Tebing	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	100%	29,911,000	
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Kec. Tebing	Jumlah dokumen/buku yang di cetak	100%	24,999,800	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Kec. Tebing	Jumlah dokumen/buku yang di cetak	99.81 %	24,638,800	
3	Penyusunan Perjanjian Kinerja Semua Eselon dan Pengukuran Indikator Kinerja OPD	Kec. Tebing	Jumlah perjanjian kinerja eselon yg di buat	100%	19,999,300	Penyusunan Perjanjian Kinerja Semua Eselon dan Pengukuran Indikator Kinerja OPD	Kec. Tebing	Jumlah perjanjian kinerja eselon yg di buat	99.81 %	19,898,170	
<b>F Program Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan</b>											
1	MTQ Tingkat Kecamatan	Kec. Tebing	Jumlah cabang yang diperlombakan	100%	150,000,000	MTQ Tingkat Kecamatan	Kec. Tebing	Jumlah cabang yang diperlombakan	99.81 %	149,865,500	
2	Pelaksanaan Bazar MTQ Tingkat Kabupaten	Kec. Tebing	Jumlah stand bazar	100%	50,000,000	Pelaksanaan Bazar MTQ Tingkat Kabupaten	Kec. Tebing	Jumlah stand bazar	99.81 %	49,986,800	

G Program Pembinaan dan Fasilitas Daerah Bawahan											
1	Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pembinaan RT/RW Se-Kabupaten	Kec. Tebing	Jumlah RT/RW yang mendapatkan uang pembinaan/Insentif	100%	340,800,000	Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pembinaan RT/RW Se-Kabupaten	Kec. Tebing	Jumlah RT/RW yang mendapatkan uang pembinaan/Insentif	99.81 %	337,800,000	
2	sosialisasi dan pembinaan TP UKS Kecamatan,desa/ke lurahan Kec,Tebing	Kec. Tebing	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	100%	49,999,840	sosialisasi dan pembinaan TP UKS Kecamatan,desa/ke lurahan Kec,Tebing	Kec. Tebing	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	0%	-	
3	Administrasi Pembinaan dan Operasional Kelurahan Tebing	Kec. Tebing	Jumlah Jenis	100%	74,999,700	Administrasi Pembinaan dan Operasional Kelurahan Tebing	Kec. Tebing	Jumlah Jenis	97%	72,503,005	
4	Administrasi Pembinaan dan Operasional Kelurahan Teluk Uma	Kec. Tebing	Jumlah Jenis	100%	75,000,000	Administrasi Pembinaan dan Operasional Kelurahan Teluk Uma	Kec. Tebing	Jumlah Jenis	99%	73,876,900	
5	Administrasi Pembinaan dan Operasional Kelurahan Pamak	Kec. Tebing	Jumlah Jenis	100%	75,000,000	Administrasi Pembinaan dan Operasional Kelurahan Pamak	Kec. Tebing	Jumlah Jenis	95%	71,189,550	
6	Administrasi Pembinaan dan Operasional Kelurahan Harjosari	Kec. Tebing	Jumlah Jenis	100%	75,000,000	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur RT/RW di Kelurahan	Kec. Tebing	Jumlah Jenis	100%	74,688,600	

7	Administrasi Pembinaan dan Operasional Kelurahan Kapling	Kec. Tebing	Jumlah Jenis	100%	74,997,060	Administrasi Pembinaan dan Operasional Kelurahan Kapling	Kec. Tebing	Jumlah Jenis	99%	74,382,060	
8	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur RT/RW di Kelurahan	Kec. Tebing	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	100%	74,999,960	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur RT/RW di Kelurahan	Kec. Tebing	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	99%	74,546,500	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renja SKPD.

##### **Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kabupaten/Kota**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi dapat terwujud dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi kecamatan dalam kurun waktu hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan keputusan Bupati Karimun Nomor 123-B.b Tahun 2016;
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundangan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah mengalami dua kali perubahan terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Meningkatkan kualitas kinerja kepala seksi yang berhubungan secara langsung dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan;
- e. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan sesuai visi, misi kecamatan dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Tebing melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);

- f. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan;
- g. Meningkatkan potensi sumber daya manusia dan ekonomi.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah bahwa RPJMD Daerah sebagai jabaran visi misi kepala daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional program-program pembangunan dan kegiatan pokok.

Salah satu yang termuat di dalam RPJMD tersebut adalah program satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD) yang dalam penyusunannya mengacu kepada visi misi dan program kepala daerah. Sebagai salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Karimun maka Kecamatan Tebing harus mempersiapkan Renja sebagai Dokumen Rencana Kerja Kecamatan 1 tahun yang akan datang.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi. Kegiatan merupakan tindakan nyata kecamatan tebing dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Program dan kegiatan Kecamatan Tebing Tahun 2022 sebagai berikut :

#### **3.3.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

##### **Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Koordinasi dan

**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**  
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD

**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

**Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Penyediaan Bahan/ Material  
Fasilitasi Kunjungan Tamu  
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD

**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Pengadaan Mebeleur  
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Pengadaan Aset Tetap Lainnya  
Pengadaan Aset Tak Berwujud  
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya  
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

**3.3.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

**3.3.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2023, Tema Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2023 adalah "Peningkatan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Sumber Daya Manusia yang Unggul" dan *Tagline* "Karimun Bangkit, Karimun Sehat, dan Bangkit Ekonomi, Bangkit Infrastruktur, SDM Unggul" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2023, maka prioritas Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Tahun 2023 menguraikan rumusan rencana program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan dan pagu indikatif untuk proyeksi pendanaan Tahun 2023.

Rumusan Program/Kegiatan Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Tahun 2023 direncanakan sebanyak 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan dengan total kebutuhan dana atau pagu indikatif sebesar **Rp 8,526,000,000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah)**, yang dapat dilihat secara detail pada tabel dibawah ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## KECAMATAN TEBINGTAHUN ANGGARAN 2023

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN	
					2023	
					TARGET	RP (000)
1	2	3		5	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.50	8,526,000,000
	1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kec. Tebing			Nilai AKIP Kecamatan Tebing	61	8,526,000,000
		7 0 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	78.5	6,675,000,000

		<b>7 0 0 2 0</b> <b>1 1 1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>99,000,000</b>
		7 01 01 2 01 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen - Renja - Renja RB	35,000,000
		7 01 01 2 01 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja  dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan  - Lapkin  - Perjanjian Kinerja (PK) - Realisasi PK	32,000,000
		7 01 01 2 01 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	32,000,000
		<b>7 0 0 2 0</b> <b>1 1 2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3,809,500,000</b>
		7 01 01 2 02 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	560 Org Bln	3,612,000,000

					Tunjangan ASN	(40 Org x 14 Bln)	
		7 01 01 2 02 0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	182,000,000
		7 01 01 2 02 0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	15,500,000
		<b>7 0 0 2 0</b>	<b>1 1 3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>27,000,000</b>
		7 01 01 2 03 0	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan - Laporan Rekonsiliasi - Laporan Asset OPD	27,000,000
		<b>7 0 0 2 0</b>	<b>1 1 5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>141,000,000</b>
		7 01 01 2 05 0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	60,000,000

		7 01 01 2 05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen - DUK	26,000,000
		7 01 01 2 05 1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Org	55,000,000
		<b>7 0 0 2 0 1 1 6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>10 Laporan</b>	<b>408,000,000</b>
		7 01 01 2 06 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,500,000
		7 01 01 2 06 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	199,000,000
		7 01 01 2 06 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8,500,000
		7 01 01 2 06 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	43,000,000
		7 01 01 2 06 0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17,000,000
		7 01 01 2 06 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10 Dokumen	13,000,000
		7 01 01 2 06 0 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	20,000,000

		7 01 01 2 06 0 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 Laporan	20,000,000
		7 01 01 2 06 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan Rapat 50 Laporan SPPD	70,000,000
		7 01 01 2 06 1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10,000,000
		<b>7 0 0 2 0 1 1 7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>257,500,000</b>
		7 01 01 2 07 0 5	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	12 unit	50,000,000
		7 01 01 2 07 0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	40,000,000
		7 01 01 2 07 0 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan lainnya yang disediakan	7 Unit	35,000,000
		7 01 01 2 07 0 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	3 Unit	28,000,000
		7 01 01 2 07 0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	27,500,000

		7 01 01 2 07 1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana yang disediakan	6 Unit	47,000,000
		7 01 01 2 07 1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30,000,000
		<b>7 0 0 2 0 1 1 8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan jasa</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>1,839,500,000</b>
		7 01 01 2 08 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	12 Laporan	8,500,000
		7 01 01 2 08 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	81,000,000
		7 01 01 2 08 0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Laporan	30,000,000
		7 01 01 2 08 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1,720,000,000
		<b>7 0 0 2 0 1 1 9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>93,500,000</b>

			<b>Pemerintahan Daerah</b>			
		7 01 01 2 09 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	5,000,000
		7 01 01 2 09 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	6,000,000
		7 01 01 2 09 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	42,500,000
		7 01 01 2 09 0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	20,000,000
		7 01 01 2 09 1 0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	10,000,000
		7 01 01 2 09 1	Pemeliharaan /	Jumlah Sarana dan	10 Unit	10,000,000



		1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
		<b>7 0 0 1 2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Mutu Pelayanan Publik	3.50	<b>1,176,000,000</b>
		<b>7 0 0 2 0 1 2 1</b>	<b><i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i></b>	<b><i>Jumlah Laporan</i></b>	<b><i>1 Laporan</i></b>	<b><i>32,000,000</i></b>
		7 01 02 2 01 0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	32,000,000
		<b>7 0 0 2 0 1 2 4</b>	<b><i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i></b>	<b><i>Jumlah Laporan</i></b>	<b><i>1 Laporan</i></b>	<b><i>1,144,000,000</i></b>

		7 01 02 2 04 0 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Di limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	1,144,000,000
		7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	66.67%	<b>675,000,000</b>
		<b>7 0 0 2 0 1 3 2</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>675,000,000</b>
		7 01 03 2 02 0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	450,000,000
		7 01 03 2 02 0 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokma	225,000,000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Tebing Tahun 2021-2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Karimun serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2023.

Rencana Kerja Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tebing untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra SKPD ( program 5 tahun ), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Tebing selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2023 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Rencana program di Kecamatan Tebing tahun 2023 merupakan program Pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur Kecamatan Tebing pada periode 2023. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tebing yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Karimun yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tebing selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Tebing Renja maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Tebing yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tebing selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun 2023 berfungsi pula sebagaisarana peningkatan kinerja Kecamatan Tebing. RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun oleh

Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Tebing sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja. Perangkat Daerah RENJA tahun 2023, dengan berdasarkan azaz perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan, pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi untuk melaksanakan kegiatan yang akan datang guna meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan.

Tebing, 2022

**CAMAT TEBING**



**MARKUS TERKELIN TARIGAN, S.Sos**

**NIP.19750321 200312 1 009**